

Judul : Uang Kuliah Mahal - Pinjol Resmi Datang Menjerat Mahasiswa
Tanggal : Rabu, 31 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Uang Kuliah Mahal

Pinjol Resmi Datang Menjerat Mahasiswa

KETUA Komisi X DPR Syaiful Huda menyoroji langkah kampus menggandeng pinjaman online (pinjol) untuk pembayaran kuliah. Pemerintah mesti mengkaji ulang konsep pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang melibatkan pinjol ini. Konsep tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2013 tentang bentuk dan mekanisme pen-

danaan PTNBH, utamanya otonomi pengelolaan pendanaan. Kemendikbudristek diminta merekomendasikan PTNBH untuk menghentikan kebijakan tersebut jika terbukti memberatkan mahasiswa. Seperti kasus pembayaran biaya kuliah dengan menggunakan pinjol di Institut Teknologi Bandung. "Kami tentu tidak ingin otoritas pengelolaan sumber pendanaan ini justru memicu komersialisasi

pendidikan. Entah itu melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau seleksi masuk mahasiswa baru melalui jalur mandiri," kata Huda dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/1/2024). Tak hanya itu, Huda juga mendorong penyediaan skema baru dalam pembayaran kuliah bagi mahasiswa yang keberatan membayar selain menggunakan Pinjol. "Kami mendorong ada kajian skema baru untuk meringankan

beban mahasiswa yang kesulitan membayar UKT," ujar Politisi PKB ini. Huda juga membenarkan bahwa PTNBH memiliki kewenangan dalam menentukan UKT bagi para mahasiswa mandiri. Kendati demikian, merujuk Pasal 65 ayat 4 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTNBH harus menentukan UKT yang terjangkau masyarakat. Huda menegaskan, PTNBH tak

boleh hanya terpaku kepada mahasiswa dalam mendapatkan sumber pendanaan. Saat ini, sebagian PTNBH masih mengandalkan biaya pendidikan dari mahasiswa sebagai sumber utama pendanaan. "Padahal mereka telah diberikan otoritas yang relatif luas menggali sumber pendanaan di luar APBN," jelas dia. Lebih lanjut, Huda menilai penggunaan pinjol dalam skema pembayaran UKT hanya menjadi

jalan pintas yang merugikan mahasiswa. Dia juga menilai, skema tersebut dapat disalahgunakan oleh para mahasiswa untuk kepentingan lain. "Kami menilai skema cicilan UKT dengan pinjol ini merupakan *short cut* yang merugikan mahasiswa. Bagi mahasiswa yang tidak mampu terpaksa mengambil opsi ini. Bagi mahasiswa nakal, opsi ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan lain. Ujungnya

mahasiswa dan wali mahasiswa yang dirugikan," tutur dia. Sebelumnya, ITB mendapat sorotan di media sosial X lantaran menawarkan metode pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjol. Kepala Humas ITB Naomi Haswanto pun membenarkan kampusnya menggunakan lembaga keuangan untuk membantu pembayaran kuliah bagi para mahasiswanya. ■ KAL